

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW***

Yan Mahameru

Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas No. 246,

Tlogomas, Babatan, Kota Malang, Jawa Timur

Yanmahameru10@gmail.com

Abstract

This study aims to seek an understanding of community empowerment through regional infrastructure development using the Literature Review method. At least there are several things we need to do before reviewing a journal article, including: Finding a journal that fits the research topic raised (differentiate a journal from an article or tutorial, Reading the entire contents of the journal, and Trying to rewrite it in your own language the meaning of From this explanation, it can be concluded that a journal review is a text that contains a summary of scientific research on certain topics. This of course can be considered as a summary or evaluation of other people's writings regarding community empowerment through regional infrastructure development. must have guidelines for the impacts and consequences of development planning In order to avoid problems in the development process, another thing is to look at the environmental impacts that will result from development projects initiated primarily at a certain regional level where the area is has characteristics that are still traditional people and are still thick with culture. The development planning process must be able to accommodate the needs of the local community without damaging the existing ecosystem and providing a good effect on the community, especially the economy and welfare.

Keywords: Community Empowerment, Infrastructure Development, Economy, Ecology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur daerah dengan menggunakan metode Literature Review. Setidaknya terdapat beberapa hal dilakukan sebelum mereview artikel suatu jurnal, diantaranya yaitu: Menemukan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat (bedakan jurnal dengan artikel atau tutorial, Membaca keseluruhan dari isi jurnal, dan Mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal/paper tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam proses mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur daerah harus memiliki padoman terhadap dampak serta akibat dari perencanaan pembangunan agar tidak terjadi permasalahan dalam proses pembangunannya. Hal lain adalah melihat pada dampak lingkungan nantinya yang akan diakibatkan dari pembangunan proyek yang akan digagas utamanya pada sebuah tingkatan daerah tertentu dimana daerah tersebut memiliki karakteristik yang masih tradisional masyarakatnya dan masih kental akan budayanya. Proses perencanaan pembangunan haruslah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat daerah tanpa merusak ekosistem yang ada dan memberikan efek baik kepada masyarakat utamanya ekonomi dan kesejahterannya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian, Ekologi

PENDAHULUAN

Kegagalan pembangunan infrastruktur dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia dikarnakan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Korten bahwa pembangunan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berangkat dari kegagalan tersebut, yang menjadi trend saat ini adalah upaya pelaksanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang kemudian mendasari wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community based resource management) yang merupakan mekanisme perencanaan yang berpusat pada pembangunan. (Ariefianto et al., 2020)

Konsep Community Development dirumuskan dalam berbagai definisi. PBB menekankan bahwa community development adalah “proses” di mana upaya atau potensi masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya pemerintah, untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya, serta mengintegrasikan masyarakat dalam konteks kehidupan bangsa. sebagai pemberdayaan agar mampu berkontribusi penuh untuk mencapai kemajuan di tingkat nasional. Rumusan tersebut menekankan bahwa community development adalah upaya terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memberdayakan masyarakat agar mampu mempersatukan dan mengarahkan diri. Pengembangan masyarakat bekerja terutama melalui promosi organisasi non-pemerintah dan upaya bersama dari individu-individu dalam masyarakat, tetapi biasanya dengan bantuan teknis dari pemerintah dan organisasi sukarela.

Definisi Community development di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Community development adalah proses pembangunan yang berkelanjutan. Artinya kegiatan dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap awal sampai tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi - kegiatan tindak lanjut dan evaluasi, pengembangan masyarakat kedua bertujuan untuk memperbaiki - meningkatkan - Kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Ketiga, Community development memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga prinsip 'bantu masyarakat untuk membantu diri sendiri' menjadi kenyataan. Keempat, Community development menekankan pada prinsip kemandirian.

METODE PENELITIAN

Riset yang dilakukan bermaksud untuk menganalisa berbagai artikel yang memiliki korelasi dengan persoalan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Berbagai artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal berskala internasional merupakan sumber daripada data yang digunakan dalam kajian ini. Ulasan yang ada dalam kajian ini didasarkan pada beberapa pertanyaan, antara lain: 1) Bagaimana usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui pembangunan infrastructure daerah?. 2) Apa tema yang relevan dan dominan dalam kajian community empowerment in building the village economy?. 3) Apa saja topik yang memiliki korelasi terkait pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastructure daerah?. 4) Apa saja konsep yang digunakan dalam studi terkait pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastructure daerah?. 5) Bagaimana jenis pemetaan yang dipakai dalam studi pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastructure daerah?

Berbagai pertanyaan seperti yang dijabarkan sebelumnya akan menjadi acuan dasar yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji terkait tema fundamen yang diusung. Sumber artikel-artikel didapatkan melalui database *SCOPUS*. Artikel-artikel yang ditemukan tersebut direview berdasarkan pada dua tahapan, antara lain: 1) Pencarian artikel, dan 2) Pemetaan topik pembahasan.

Artikel dicari melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi artikel yang akan digunakan. Cara untuk mendapatkan artikel tersebut dapat diambil melalui publikasi dari berbagai penerbit dengan menggunakan perangkat lunak berbasis database scopus. Selanjutnya pada tahap ini memasukan kata kunci sesuai “community empowerment through infrastructure development” dan diberikan pembatasan tahun penerbitnya hanya berlaku dua tahun terakhir atau sama halnya dengan tahun 2019 hingga pada tahun 2021. Pencarian tersebut menghasilkan sebanyak 54 artikel yang telah diseleksi dari 230 artikel yang merupakan relevan dengan topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil review yang diolah menggunakan aplikasi VOSViewer memetakan konsep berdasarkan pada kelompok (Perhatikan *table 1*). Gambar 1 menunjukkan berbagai nama konsep yang diturunkan dari tampilan kepadatan *cluster*. Distingsi warna menjadi suatu indikasi diferensiasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dalam mengidentifikasi tema yang ada. Hal tersebut juga

Cluster 3	Action, awareness, control, evaluation, evidence, goal, health, india, integration, intervention, livelihood, outcome, partnership, population, poverty, progress, response, risk,	18
Cluster 4	Community empowerment, community participation, data, effect, facility, fact, government, human resource, income, Indonesia, infrastructure development, local government, management, private sector, program, village.	16

Untuk cluster 1 berkaitan dengan focus pemerintah menentukan konsep kerangka kerja dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemabangunan infrastructure, maka artikel yang relavan dengan konsep tersebut ialah yang di tulis oleh (Ribeiro & McMartin, 2019) dengan judul “A methodological framework for sustainable development with vulnerable communities” yang dimana secara selektif mengidentifikasi dan mengoptimalkan pendekatan pembangunan berkelanjutan seperti permakultur, pendekatan mata pencaharian berkelanjutan, pemasaran sosial berbasis masyarakat, penilaian dampak lingkungan dan manajemen proyek untuk secara efektif merancang dan memperkenalkan teknologi sosial bersih untuk dan dengan komunitas yang rentan. Dalam pengoptimalkan pemabangunan infrastructure.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastrukture dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai macam kerangka kerja, salah satu kerangka kerja menurut (Ribeiro & McMartin, 2019) yaitu Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat Cerdas (SCDF) adalah kerangka kerja metodologis yang secara selektif mengidentifikasi dan mengoptimalkan pendekatan pembangunan berkelanjutan seperti permakultur, pendekatan mata pencaharian berkelanjutan, pemasaran sosial berbasis masyarakat, penilaian dampak lingkungan dan manajemen proyek untuk secara efektif merancang dan memperkenalkan teknologi sosial bersih untuk dan dengan komunitas yang rentan. Kerangka kerja ini dibuat dan dievaluasi dengan tujuan memastikan pengambilan keputusan yang diberdayakan oleh komunitas yang akan menghasilkan perbaikan permanen dan berkelanjutan pada desain, infrastruktur, dan teknologi komunitas.

Model SCDF adalah model alur kerja yang mendukung komunitas dalam menetapkan tingkat kerentanan mereka dan mengidentifikasi masalah; memilih tindakan yang ditargetkan; menentukan ketersediaan sumber daya dan hambatan utama; mengoptimalkan teknologi tepat guna dan program sosial untuk mengatasi masalah; menilai dampak lingkungan dan implementasi; menganalisis pemberdayaan; dan mengembangkan pedoman transfer daya. Para pemimpin lokal, insinyur, manajer proyek

dan pembuat kebijakan dapat menggunakan model SCDF untuk berkolaborasi dalam perumusan rencana aksi yang efektif di seluruh dunia.

Apabila menerapkan kerangka kerja semacam ini diterapkan pada proses pembangunan diharapkan dapat menyerap segala aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastrukture yang memberdayakan masyarakat kedepannya, selain itu perlunya menyesuaikan dengan kebutuhan mata pencarian masyarakat dengan membangun infrastrukture terkait kebutuhan masyarakat maka pembangunan dapat dikatakan tepat sasaran, adapun juga mengenali berbagai potensi dan pemetaan wilayah dari daerah tersebut, sebab setiap daerah memiliki wilayah dan potensi yang berbeda sehingga perlu mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat dibangun dari empat dimensi, yaitu ekonomi, masyarakat, politik, dan psikologi. Kedua, bobot berbagai faktor dihitung dengan menggunakan proses hierarki analitik, dan status quo pemberdayaan wisata komunitas dievaluasi secara komprehensif dengan metode analisis fuzzy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat di kota kuno Zhujiajiao berada di antara “sedang” dan “baik”. Pemberdayaan psikologis memiliki skor terbaik, sedangkan pemberdayaan politik relatif lemah. Jadi, dilema sistem partisipasi top-down perlu diubah. Organisasi pariwisata swadaya dan aturan distribusi pendapatan harus dibentuk bersama dengan pelatihan kemampuan manajemen pariwisata untuk mengoptimalkan mekanisme partisipasi masyarakat.

Penerapan proses hierarki analitik untuk pemberdayaan pariwisata kota kuno merupakan upaya baru dan skala evaluasi dapat digunakan untuk situs lain yang serupa. Strategi dalam makalah ini memiliki nilai referensial untuk keberlanjutan pariwisata dalam praktiknya. (Zhou et al., 2021). Dalam penelitian tersebut pembangunan ditujukan pada lima aspek yaitu pemberdayaan ekonomi, yang dimaksud adalah bagaimana pembangunan infrastrukture memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui ifrastrkture yang dibangun dan melalui pemabngunan tersebut menciptakan berbagai mata pencaharian masyarakat. sedangkan pemberdayaan psikologis yang dapat ditempuh ialah meningkatkan rasa kepemilikan, rasa bangga atas kepemilikan infrastructure yang telah dibangun, rasa bangga tersebut muncul karena adanya keterlibatn masyarakat dalam membangun infrastructure tersebut, maka dari rasa bangga tersebut muncul pemahaman untuk merwat dan menjaga agar tidak mengalami kerusakan.

Selanjutnya pemberdayaan social diawali dari terbukanya kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam pemabngunan. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah membutuhkan ketelibatan masyarakat untuk menyelenggarakan perekonomian, akibatnya individu akan masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut, terlibat secara bersama, hingga akhirnya muncul kekompakan di antara masyarakat. Kekompakkan yang meuncul dalm pemberdayan masyarakat ituah dianggap pemberdayaan secara sosialkebutuhan masyarakat di suatu daerah maka pemerintah. Adapun pemberdayaan politis dalam pemabngunan infrastructure ditandai dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Masyarakat dapat menyuarakan perhatian mereka mengenai pembangunan infrastructure melalui forum fan ikut berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemberdayaan poltis juga bisa dilaksanakan dengan adanya keterwakilan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok pemuda, LSM, dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan pada level desa dan setingkatnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur juga perlu untuk meminimalisir dampak dari resiko bencana maupun non bencana yang sewaktu-waktu terjadi di masa depan dengan berbagai inovasi yaitu Berdasarkan hasil studi, terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan saat mengembangkan dan mengoperasikan sistem peringatan dini multi-bahaya yang efektif. Pengaturan kebijakan, legislatif dan kelembagaan; pertimbangan sosial dan budaya dan tatanan teknologi dan ilmiah adalah tiga kategori.

Pengaturan kebijakan, legislatif dan kelembagaan berisi tata kelola, pengakuan politik, pengarusutamaan peringatan dini ke dalam perencanaan pembangunan, kemitraan pemangku kepentingan, umpan balik berkala, pemberdayaan otoritas lokal dan penyediaan sumber daya / infrastruktur. Pertimbangan sosial dan budaya mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas, kesadaran dan pendidikan, perencanaan dan kesiapsiagaan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pertimbangan perspektif gender dan keragaman budaya. Terakhir, integrasi pengetahuan teknologi dan ilmiah, informasi risiko, penyebaran dan komunikasi peringatan bahaya, serta pemantauan dan peramalan adalah pengaturan teknologi dan ilmiah yang harus dipastikan untuk peringatan dini multi-bahaya yang efektif untuk pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan. (Hemachandra et al., 2021)

Pengelolaan kawasan ekonomi khusus mandalika diperlukan sumber daya manusia yang mampu membawa keberhasilan ekonomi masyarakat adapun penentu keberhasilan meliputi pengembangan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan; pengendalian biaya, kualitas dan waktu; berfungsinya dan manfaat infrastruktur yang dibangun, dimana pembangunan infrastruktur mempengaruhi sistem ekonomi dan sosial di lingkungan sekitarnya; pengembangan sumber daya manusia melalui studi kasus; kompensasi finansial yang diterima (pembayaran langsung); komitmen anggota organisasi; identifikasi dan alokasi risiko; akurasi pilihan teknologi yang digunakan; ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan; pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. (Jegoteluko & Sakti, 2020)

Dalam dinamika pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemanfaatan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam) seefektif dan seefisien mungkin. Kemampuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya ini akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dirujuk. Dengan kata lain, ketersediaan (aspek kuantitatif), kualitas sumber daya (aspek kualitatif), dan dimensi pemanfaatannya harus dirumuskan dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang baik, berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. . Salah satu sumber daya berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan adalah perusahaan yang beroperasi menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR perlu diperhatikan untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan pembangunan daerah melalui CSR dapat membantu meringankan peran pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi program CSR perusahaan dan program pemerintah daerah. (Yogia et al., 2019)

Pembangunan infrastrukture pariwisata adalah salah satu pembugnan bahari menjadi salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan di hampir semua negara di dunia. Dalam satu dekade terakhir, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 8,3%, jauh di atas pertumbuhan global yang hanya 3,6%. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Namun demikian, pertumbuhan dan potensi yang masif dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, khususnya kelautan. Metode yang

digunakan adalah metode sequential mix dengan Sistem Informasi Geografis, ATLAS.ti, dan analisis stakeholder dengan MACTOR sebagai alat analisisnya.

Studi ini menemukan bahwa pembangunan lingkungan dan wisata bahari membutuhkan prasarana dan sarana, penyiapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pariwisata ecomarine membutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik regulator, pelaksana, lembaga pendukung, sasaran, dan masyarakat sebagai pelaku utama. Model pengembangan wisata ecomarine didasarkan pada konsep *who do what*, dimana masyarakat memperoleh dukungan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, transformasi pekerjaan dari nelayan / petani menjadi pelaku usaha pariwisata, pendampingan lokal, dan terbukanya jejaring pariwisata. (Mafruhah et al., 2020)

Pemberdayaan usaha ekonomi kecil dan menengah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis (1) bagaimana pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai determinan peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah; (2) pengaruh kebijakan pemerintah, dukungan modal usaha, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM); dan (3) strategi untuk meningkatkan produktivitas usaha dan keberlanjutan UMKM. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan inovasi teknologi akan meningkatkan produktivitas usaha ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah, dukungan permodalan usaha, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM, dengan koefisien determinasi sebesar 97,6%. Strategi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi teknologi direkomendasikan untuk pengambilan keputusan pemerintah sebagai upaya peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat di Kota Makassar, Indonesia.

Pekerja lepas, wirausahawan, usaha baru, tetapi juga perusahaan lama semakin banyak menggunakan ruang kerja bersama (CWS). Penyelarasan ruang kerja dan ruang sosial dapat memfasilitasi pemberdayaan organisasi yang mendukung kepuasan kerja individu. Studi metode campuran kami terhadap 328 responden dari CWS di 26 kota di AS, Jerman, dan Cina mengidentifikasi konfigurasi pola kelembagaan pada kepuasan kerja yang terkait dengan rasa komunitas, otonomi, partisipasi, keragaman keterkaitan, dan penciptaan pengetahuan bersama. Kepuasan kerja yang tinggi dapat terjadi dalam tiga konfigurasi berbeda yang terkait dengan a) perumahan agility, b) perumahan pengetahuan, dan c) perumahan sosial. Temuan kami berkontribusi pada bagaimana

perusahaan lama dan CWS dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan memberdayakan inovasi dan kinerja kewirausahaan

Pada cluster 2 yang paling dominan yaitu sustainable development, efektivitas yang mempunyai keterkaitan dengan artikel yang di tulis oleh (Yogia et al., 2019) dengan judul “Regional development management through CSR in Pelalawan District, Riau Province” adanya bentuk pengoprasian menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui dana CSR untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan pembangunan daerah melalui CSR dapat membantu meringankan peran pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk pembangunan agar terus berlanjut tanpa adanya masalah kedepanya. Kemampuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya ini akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dirujuk. Dengan kata lain, ketersediaan (aspek kuantitatif), kualitas sumber daya (aspek kualitatif), dan dimensi pemanfaatannya harus dirumuskan dalam kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang baik, berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Adapun juga maka artikel yang relevan dengan tema dominan yaitu artikel yang dibahas oleh (Sahid, A, Amirullah, I, Rahman, A A, Senaman, A, Yusriadi, Y, 2020) dengan judul artikel “*The role of the government in supporting the duties of local governments in Makassar City*” yang menjelaskan bahwa Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, Negara Indonesia telah mengatur maksimalisasi pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pendekatan pemberdayaan masyarakat tentunya diharapkan mampu memberikan peran bagi individu bukan sebagai objek melainkan sebagai aktor atau aktor yang menentukan kehidupannya sendiri. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat berpusat pada manusia dengan melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program, komponen standar pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat difasilitasi untuk mencapai pelayanan esensial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. , adapun tema yang dominan dibahas oleh (Yulyanah, Siti, Sarofah, Riska, Santi, Fitria) dengan judul artikel “*Management of the*

Pesisir Area in Muara Village, District of Teluk Naga Regency, there are many programs to track the development of coastal areas through government programs, both the Central Government and the Regional Government. OASE is a platform for networking” yang menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintah di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan yang memiliki wilayah pesisir dibagian utara. Luas wilayah pesisir Kabupaten Tangerang adalah ± 301,62 km² dan panjang garis pantainya 51 KM. Wilayah pesisir pantainya berada dibagian utara yang meliputi 7 kecamatan pantai yaitu, Kronjo, Mekar Baru, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, Kosmabi dan Sukadiri (Putri, Pengeoloaan Wilayah Pesisir di Desa Muara Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, 2018).

Pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Tangerang hingga saat ini belum optimal masih terdapat angka kemiskinan yang ditinggi di wilayah pesisir kaputapen tangerang, dilihat dari tingginya angka kemiskinan pemerintah membuat banyak program untuk menjeahtrakan pembangunan wilayah pesisir melalui program program pemerintah baik Pemeirntah Pusat maupun Pemeirntah Daerah. permasalahan kemiskinan dilihat dari data mata pencarian masyaratnya karena masyarakat Desa Kohod mayoritas buruh tani dan tidak mempunyai pekerjaan, maka dari itu masalah kemiskinan di Desa Kohod cukup meningkat. Dengan banyaknya pengaguran atau tidak bekerja maka kemiskinan di desa tersebut semakin meningkat karena mereka tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarganya. Pembangunan di Desa kohod masih terbilang tidak layak. Bisa dilihat dari rumah warga kurang lebih 800 rumah yang tidak layak huni, pembangunan infrastruktur jalan yang kurang memadai, pembangunan sekolah yang belum layak, serta pembangunan dalam segi pemberdayaan masyarakat yang kurang dari angkat kesejahteraan. Dengan demikian, OASE berkolaborasi dengan pemerintah membuat program kampung sejahtera dengan tujuan mengatasi permasalahan yang ada di Desa Kohod, OASE ingin bertransformasi pembangunan di Desa Kohod agar desa tersebut menjadi Desa percontohan dan bisa pengatasi masalah kemiskinan.

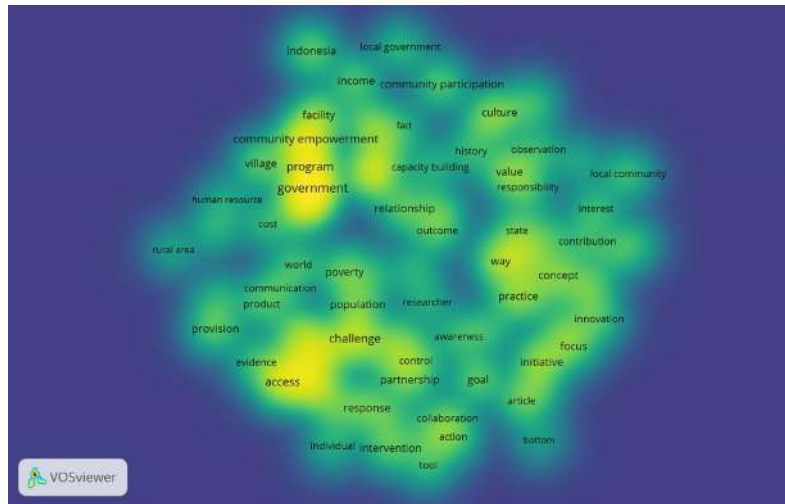
Cluster 3 terdapat topic yang dominan adalah risk, dalam hal ini artikel yang terkait diteliti oleh (Hemachandra et al., 2021) ” Enablers for Effective Multi-hazard Early Warning System: A Literature Review. In D. R., M. P., W. K., D. S. S., & F. S. (Eds)” pada artikel ini membahas tentang penangulan dan dampak resiko bencana dan non bencana yang sewaktu-waktu terjadi di masa yang akan datang. Adapun artikel lain yang dibahas oleh (Wildan dan Sukardi, 2020) dengan judul artikel “*Effectiveness of ecotourism sector-based economic strengthening models for local community*

entrepreneurial competencies” yang menjelaskan bahwa Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sumber daya alam akibat eksploitasi pariwisata memerlukan alternatif lain dalam pengelolaannya, seperti ekowisata. Namun, tuntutan tersebut baru bisa terwujud jika sejak awal masyarakat dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam pengelolaan ekowisata. pedoman peningkatan ekonomi masyarakat, modul pengembangan produk ekowisata (kerajinan, kuliner, budidaya, dan cinderamata), modul pengembangan usaha dan pemasaran, dan pedoman produksi proyek. pembangunan ekonomi berbasis sektor ekowisata terbukti efektif dalam pembentukan kompetensi kewirausahaan masyarakat lokal dalam menghasilkan produk ekowisata. Implikasinya, perlu dukungan dari para pembuat kebijakan dan pentingnya perluasan teori ekonomi berkelanjutan di sektor pariwisata dalam konteks Indonesia.

Cluster terakhir yaitu cluster 4, memiliki topic yang dominan berupa program, potensi dalam hal ini artikel yang memiliki keterkaitan yaitu ditulis oleh (Mafruhah et al., 2020) “Causality between tourism industry development and the ecological sustainability in marine environment: A convergence and divergence among stakeholder with mactor analysis” pada artikel ini lebih membahas mengenai program pariwisata bahari yang mana terkait dengan potensi pengembangan pariwisata, dimana pemberdayaan masyarakat melalui penduduk pesisir yang dominan.

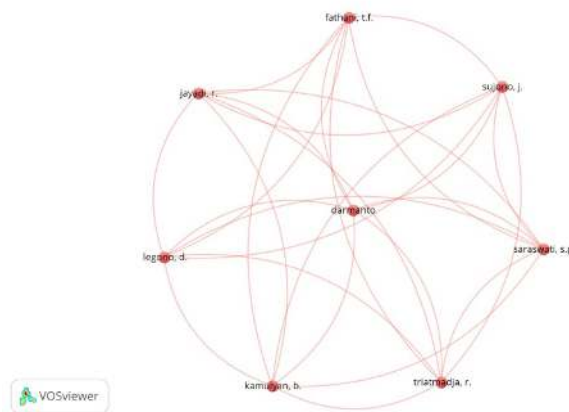
1) Tema dominan dalam studi pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur daerah

Dalam penelusuran topik pembahasan yang terdahulu berkaitan dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur KEK mandalika, ditemukan beberapa kata yang lebih dominan. Dalam penelusuran dari topik pembahasan yang terdahulu, khususnya berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, maka dapat ditemukan kata yang paling dominan. Kata-kata tersebut antara lain: community empowerment, program, government, acces, concept, facility, control, challenge. Berbagai macam kata tersebut memiliki distingsi dari sisi ketebalan warna yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kata dengan warna yang cenderung tebal merupakan kata yang memiliki keterkaitan yang dominan dengan tema yang dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu. Dari berbagai macam kata yang dominan tersebut memiliki kausalitas atau keterkaitan yang kompleks sehingga memudahkan penulis untuk menarik simpulan yang akan mengerucut terkait tema yang dibahas.



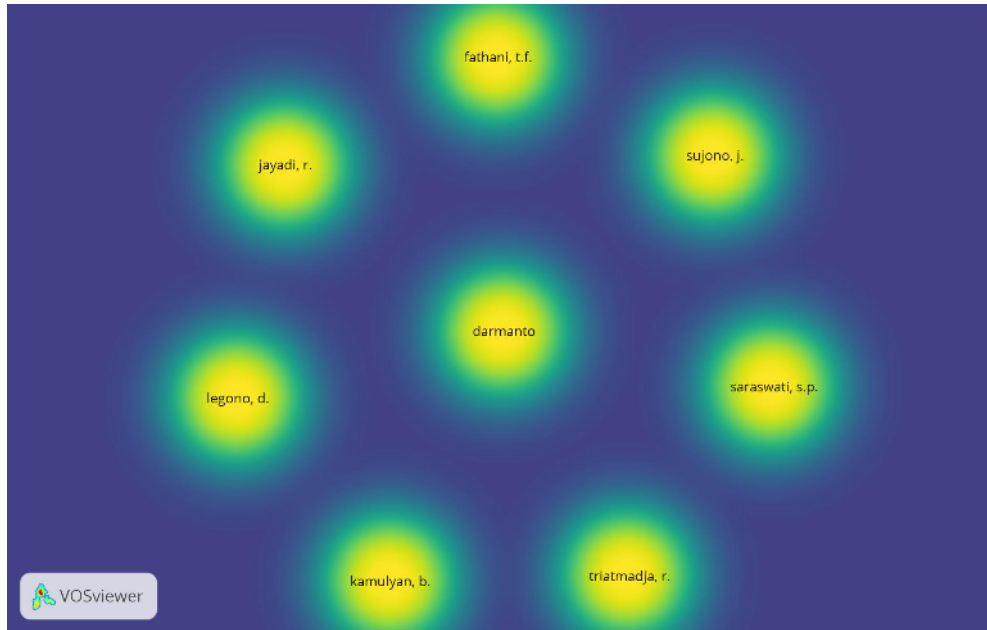
Gambar 2. Konsep Dominan Dilihat dari Desnity visualization

2) Author Dominan dalam Studi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur Daerah



Gambar 3. pemetaan data author dengan mode Network Visualization

Dalam pemetaan author ini, terdiri dari 1 cluster yang di dominasi oleh Darmanto. Karena dalam pemetaan gambar di atas menunjukkan Darmanto. Berada pada titik pusat cluster yang artinya artikel dari Darmanto Memiliki keterkaitan topik atau tema dengan author lainnya. Secara menyeluruh dari 1 cluster, author yang paling dominan pada penelitiannya adalah tidak ada. Karena 8 author memiliki kedudukan yang sama/dominan dalam melakukan penulisan artikel.



Gambar 4. (Pemetaan data Author dengan mode Density Visualization)

Tabel 2. Pemetaan Author

Cluster	Nama Author	Total
Cluster 1	Darmanto, fathani, t.f.Jayadi, r, Kamulyan, b. Legono, d, Saraswati, s.p, Sujono, j, Triatmadja, r.	8

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, yang artinya penelitian ini menghasilkan bagaimana peran pemerintah maupun non pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi sendiri dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita serta lajunya pembangunan ekonomi, definisi pembangunan sendiri tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Karena pada dasarnya tujuan dari pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bedanya pembangunan ekonomi itu sendiri meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan

kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 2. Memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan sekitar, 3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan, 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan,

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber jurnal yang sesuai dengan judul yang diangkat sehingga perlu adanya penemuan hal-hal baru untuk mengungkapkan permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan wilayah pedesaan, selain itu keterbatasan yang ditemukan perbedaan negara yang memiliki pandangan tersendiri terhadap pembangunan wilayah pedesaan berbeda dengan di Indonesia dengan keanekaragaman serta sifat tradisional masyarakatnya sehingga dalam proses pembangunan desa perlu mengakomodasi kepentingan serta tidak mengganggu ekologi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Selain itu proses perencanaan pembangunan berkelanjutan juga masih kurang akan sosialisasinya dan pengaplikasiannya karena masih banyak negara yang tidak memiliki aturanyang mengikat menegnai pelaksanaan perencanaan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, L., Hilmi, M. I., Hendawijaya, A. T., Indrianti, D. T., & Fajarwati, L. (2020). Community empowerment of limestone mountain area: Community development program PT Semen Puger Tbk. In Sumardi (Ed.), *2nd International Conference on Environmental Geography and Geography Education, ICEGE 2019* (Vol. 485, Issue 1). Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012075>
- Hemachandra, K., Haigh, R., & Amaratunga, D. (2021). Enablers for Effective Multi-hazard Early Warning System: A Literature Review. In D. R., M. P., W. K., D. S. S., & F. S. (Eds.), *10th International Conference on Structural Engineering and Construction Management, ICSECM 2019* (Vol. 94, pp. 399–416). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7222-7_33
- Jegoteluko, & Sakti, W. I. (2020). Development of unskilled labour into skilled labour at the jetty project of PLTU Tanjung Jati B Units 5 and 6. *2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Technology and Engineering, TICATE 2019*, 852(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/852/1/012028>
- Mafruhah, I., Supriyono, S., Mulyani, N. S., & Istiqomah, N. (2020). Causality between tourism industry development and the ecological sustainability in marine

- environment: A convergence and divergence among stakeholder with mactor analysis. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(4), 85–92. <https://doi.org/10.32479/ijeep.7989>
- Ribeiro, L. F. V, & McMartin, D. W. (2019). A methodological framework for sustainable development with vulnerable communities. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 11(2), 133–139. <https://doi.org/10.1080/20421338.2018.1532629>
- Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., & Hasse, J. (2019). Regional development management through CSR in Pelalawan District, Riau Province. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 239–255.
- Zhou, X., Wang, J., & Zhang, S. (2021). Evaluation of community tourism empowerment of ancient town based on analytic hierarchy process: A case study of Zhujiyajiao, Shanghai. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su13052882>
- Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S., Marsuki, N. R., Umanailo, M. C. B., & Kaya, I. R. G. (2020). The village kalesang program as a poverty alleviation community. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3103–3107. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082624670&partnerID=40&md5=7c379200de7c2d0d9c50088526b08baf>
- Ling, T.-Y. (2021). Investigating the malleable socioeconomic resilience pathway to urban cohesion: a case of Taipei metropolitan area. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01197-9>
- Yulyanah, S., Sarofah, R., & Santi, F. (n.d.). *Pengeoloaan Wilayah Pesiisr di Desa Muara Kecamatab Teluk Naga Kabupaten banyak program untuk menjeahtrakan pembangunan wilayah pesisir melalui program program pemerintah baik Pemeirntah Pusat maupun Pemeirntah Daerah . OASE merupakan wadah untuk jejaring*. 53–73.
- Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S., Marsuki, N. R., Umanailo, M. C. B., & Kaya, I. R. G. (2020). The village kalesang program as a poverty alleviation community. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3103–3107. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082624670&partnerID=40&md5=7c379200de7c2d0d9c50088526b08baf>

